

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA JUNGKAT KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:

Dewita^{1*}

NIM. E1011151101

Dr. Zulkarnaen², Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si²

*Email: dewitach09@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Dilihat dari identifikasinya adalah program Kampung Keluarga Berencana belum mampu meningkatkan Kesejahteraan masyarakat serta banyaknya kegiatan Kampung Keluarga yang tidak dilaksanakan. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yakni deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Kantor Desa Jungkat khususnya Kepala Desa selaku ketua kelompok kerja, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Siantan selaku sekretaris kelompok Kerja, Kepala Dusun Raden Wijaya, dua orang anggota pengurus kelompok kerja serta masyarakat yang ada di Kampung Keluarga Berencana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program Kampung KB yang terdiri dari enam aspek yaitu Ukuran dan Tujuan, Sumberdaya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kecendrungan Pelaksana serta pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Sarannya sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi implementor untuk meningkatkan kualitas kerja dan membangun komitmen agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.

Kata Kunci : Implementasi, Program Kampung Keluarga Berencana.

A. PENDAHULUAN

Masalah yang dihadapi Indonesia masih sangat kompleks, mulai dari permasalahan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan maupun kesehatan. Kendala utama yang dihadapi sebagian besar bersumber dari permasalahan kependudukan. Permasalahan tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintahan maupun dunia. Maka dari itu untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah mencanangkan program atau cara untuk mengontrol, mencegah dan menunda kehamilan.

Pemerintah Indonesia kemudian terus melakukan perubahan cara demi terwujudnya pemerataan program KB. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan BKKBN untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja, tetapi pada masalah pembangunan keluarga berencana

juga. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara nasional membuat terobosan baru yaitu “Program Kampung KB” atau lengkapnya “Program Kampung Keluarga Berencana”. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti program tersebut kemudian dikeluarkanlah surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 440/70SJ tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di tiap-tiap Kabupaten/Kota serta surat Kepala BKKBN RI Tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 007/RC.300/B.1/2016 tentang Pembentukan dan Pencanaan Kampung KB

Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun, Desa atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang

dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (Pedoman Pelaksanaan Kampung KB, 2016). Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui seluruh program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui seluruh program KKBPK. Berdasarkan data Kesejahteraan Keluarga Dusun Raden Wijaya, tercatat peningkatan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dari yang sebelumnya 304 KK kini menjadi 312 KK. Jumlah Keluarga dengan kategori miskin pada tahun 2017 adalah 111 KK (pra sejahtera 34 KK dan Keluarga sejahtera 177 KK) sedangkan pada tahun 2018 jumlah keluarga miskin adalah sebesar 115 KK (pra sejahtera 36 KK dan Keluarga Sejahtera 1 berjumlah 79 KK). Yang berarti bahwa sejak program Kampung KB dijalankan di Dusun Raden Wijaya pada tahun 2017 hingga 2018 masih belum mampu meningkatkan tingkat

kesejahteraan masyarakat di Kampung KB.

Permasalahan berikutnya menurut informasi yang peneliti dapatkan dari Sekretaris pengurus Kampung Keluarga Berencana Desa Jungkat yang bertugas menerima mengolah laporan dan membuat laporan evaluasi kegiatan Kampung KB. Kegiatan Kampung KB Desa Jungkat belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan Kampung Keluarga Berencana yang hingga saat ini tidak dijalankan serta sarah sehan yang merupakan puncak pembentukan komitmen di Kampung Keluarga Berencana, yang dilakukan setahun dua kali pada awal tahun untuk merencanakan kegiatan serta pada pertengahan tahun untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan dilapangan yang tidak dijalankan, sehingga program kampung KB menjadi tidak termonitoring dan terbengkalai.

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program kampung KB bagi pria di Desa

Jungkat yang belum berjalan optimal. sehingga dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa implementasi program kampung keluarga berencana Desa Jungkat belum berjalan optimal ? Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program kampung KB Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Kampung KB Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

Manfaat teoritis yakni ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam Ilmu Administrasi Publik pada kajian kebijakan publik khususnya pada implementasi program Kampung Keluarga Berencana di Desa Jungkat. Manfaat lain dari penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berguna kepada masyarakat/pembaca untuk menjadi dasar pemikiran dalam memahami teori implementasi kebijakan. dan Manfaat praktis:

1. Penelitian ini dapat bermanfaat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah untuk penulis sendiri selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
2. Dapat menjadi bahan masukan bagi implementor dan seluruh pihak yang berkaitan dalam implementasi suatu kebijakan khususnya program kampung keluarga berencana di Desa Jungkat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Menurut Dye (dalam Subarsono, 2016, 2), kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah Apa saja yang tidak

dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan atau program-program yang dilakukan pemerintah.

Keberhasilan implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, Budi, 2016, 142-150), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-

pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan. Akan tetapi dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh penulis perorangan. Pada akhirnya pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana
Implementasi akan berjalan

efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan demikian sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Banyak sekali karakteristik badan-badan administratif yang telah memengaruhi pencapaian kebijakannya. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan Van Metter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi.

Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan

baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personel mereka. Disamping itu perhatian juga perlu ditunjukkan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam sistem penampaian kebijakan.

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Metter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang cukup besar. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Metter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan badan pelaksana.

6. Kecendrungan Pelaksana (Implementor)

Pada indikator sebelumnya mengenai pemahaman tentang definisi dan persepsi dalam melihat masalah kebijakan adalah merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subjektivitas individu juga memegang peranan yang sangat besar.

Van metter dan van horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dbicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yakni: kognisi (komprehensi dan pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Untuk mendeskripsikan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi situasi yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Maksud peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementasi program Kampung KB di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti

menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017, 4) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dikarenakan peneliti ingin mencari fakta ataupun permasalahan yang terjadi terkait dengan implementasi program Kampung Keluarga Berencana di Desa Jungkat Kecaatan Siantan Kabupaten Mempawah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode tersebut dapat digunakan peneliti untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan tanpa ada batasan apapun serta ingin terjun langsung merasakan permasalahan secara langsung.

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan dan menganalisis Implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah menggunakan teori Van Metter Van Horn yang terdiri dari

enam variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan antara lain ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang merupakan dasar serta standar dalam pelaksanaan program kampung Keluarga Berencana di lapangan, Sumberdaya kebijakan yang dimana menurut Van Metter Van Horn yaitu berfokus pada sumberdaya anggaran dalam pelaksanaan Kampung KB, karakteristik agen pelaksana yaitu struktur birokrasi serta pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program Kampung KB, sikap kecenderungan para pelaksana yaitu bagaimana sikap para implementor kebijakan terhadap program Kampung KB apakah menerima atau tidak yang dapat mempengaruhi implementasi program, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan program di lapangan, karena keberhasilan suatu program dimulai dari bagaimana implementor mampu untuk berkomunikasi dan bekerjasama dalam mengelola program, serta lingkungan ekonomi,

sosial, dan politik yang mempengaruhi program kampung keluarga berencana di Lapangan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Adapun pertimbangan yang mendorong peneliti memilih di lokasi tersebut karena Desa Jungkat adalah Desa dimana Program Kampung Keluarga Berencana dicanangkan, khususnya pada Dusun Raden Wijaya yang menjadi fokus Implementasi program Kampung Keluarga Berencana di Desa tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2019.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian diambil secara *purposive*. Pengambilan subjek secara *purposive* dilakukan karena peneliti ingin mencari informasi yang akurat mengenai permasalahan yang terjadi. Informasi yang diperoleh dari subjek yang berperan penting dalam implementasi program Kampung KB di Desa Jungkat. Adapun yang menjadi

subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Jungkat selaku Ketua Pokja Program Kampung Keluarga Berencana Desa Jungkat.
2. PLKB Kecamatan Siantan selaku Sekretaris kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana Desa Jungkat.
3. Kepala Dusun Raden wijaya selaku petugas operasional Kampung KB Desa Jungkat
4. Anggota Kelompok Kerja Kampung KB (2 Orang)
5. Warga Kampung Keluarga Berencana (4 Orang)

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi program keluarga berencana di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik observasi, penulis berada diantara objek penelitian untuk mengamati secara langsung fenomena maupun keadaan yang nyata yang ada dilapangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati secara langsung bagaimana implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Jungkat

Teknik wawancara, penulis mengadakan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap informan kunci sebagai sumber data. Pertanyaan yang diajukan berkaitan erat dengan bagaimana implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Jungkat

Teknik dokumentasi, penulis memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan alat berupa kamera. Dengan menggunakan alat dokumentasi tersebut banyak aspek pengamatan dapat didokumentasikan dengan lebih sempurna dan penulis dapat

berulangkali mengamati dengan seksama.

5. Analisis Data

1. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2017, 330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Denzin (dalam Lexy J. Moleong, 2017, 330) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. sebenarnya dilapangan, maka penulis melakukan uji validitas dari data yang perlu di uji dengan uji kredibilitas data dengan melakukan triangulasi. Triangulasi terdiri dari tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang

telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data, maksudnya dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, maksudnya yaitu pengecekan kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Pada triangulasi sumber ini penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini penulis bertujuan melakukan *check and recheck*. hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui kebenaran data dengan menyatakan pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda.

2. Teknik Analisis data

Menurut Sugiyono (2017, 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data di lapangan menurut Miles dan Huberman dalam Sugioyo (2017, 243) analisis terbagi menjadi tiga alur kegiatan yaitu :

1. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Verifikasi, langkah ketiga analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti telah diungkapkan dalam

tujuan penelitian pada Bab I, dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Jungkat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Untuk itu terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan data serta informasi yang penulis dapatkan selama melaksanakan penelitian di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah

direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Pada Bab I dibagian latar belakang penelitian telah dikemukakan bahwa implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Jungkat belum berjalan optimal. Dilihat dari data Kesejahteraan Keluarga Dusun Raden Wijaya Tahun 2017-2018. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Program Kampung Keluarga Berencana belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung KB. Berdasarkan data tersebut, Kesejahteraan masyarakat tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, Jumlah Keluarga dengan kategori miskin pada tahun 2017 adalah 111 KK (pra sejahtera 34 KK dan Keluarga sejahtera 1 77 KK) sedangkan pada tahun 2018 jumlah keluarga miskin adalah sebesar 115 KK (pra sejahtera 36 KK dan Keluarga Sejahtera 1 berjumlah 79 KK). Yang berarti bahwa sejak program Kampung KB

dijalankan di Dusun Raden Wijaya pada tahun 2017 hingga 2018 masih belum mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kampung KB .

Selanjutnya menurut informasi yang peneliti dapatkan dari Sekretaris pengurus Kampung Keluarga Berencana Desa Jungkat yang bertugas menerima mengolah laporan dan membuat laporan evaluasi kegiatan Kampung KB. Kegiatan Kampung KB Desa Jungkat belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan Kampung Keluarga Berencana yang hingga saat ini tidak dijalankan serta sara sehan yang merupakan puncak pembentukan komitmen di Kampung Keluarga Berencana, yang dilakukan setahun dua kali pada awal tahun untuk merencanakan kegiatan serta pada pertengahan tahun untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan dilapangan yang tidak dijalankan, sehingga program kampung KB menjadi tidak termonitoring dan terbengkalai.

Dari pernyataan diatas penulis merasa tertarik untuk melaksanakan

penelitian di Desa Jungkat dengan alasan bahwa implementasi program Kampung KB Desa Jungkat belum berjalan secara optimal. Maka dari itu, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan implementasi program KB pria.

Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan fokus observasi. Fokus observasi yakni pada pola atau teknik pengawasan yang dilakukan masing-masing unsur pelaksana atau implementor dalam melaksanakan implementasi program Kampung KB Desa Jungkat. Observasi dilakukan guna untuk melihat tugas dan tanggung jawab implementor dalam suatu program apakah sudah dilaksanakan atau belum. Data hasil observasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih. Kemudian didapatlah data dan informasi yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Kampung KB Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten

Mempawah.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pada implementasi program Kampung KB Desa Jungkat masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan implementasi program, KB itu belum berjalan secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan implementasi program Kampung KB sudah jelas. Hal ini dapat dilihat dari adanya SOP (*Standar Operational Procedures*) berupa buku petunjuk teknis kampung KB yang dikeluarkan oleh BKKBN Nasional sebagai pedoman implementor dalam mengimplementasikan atau mengelola

program Kampung KB di masyarakat. Bahwa sebagai pelaksana Kebijakan para implementor telah mengetahui dan memahami ukuran dan tujuan program Kampung KB, dan berupaya agar sasaran dari program kampung keluarga berencana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KKBPK

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah ini tidak memadai, dikarenakan tidak adanya anggaran yang disediakan dari Desa untuk pelaksanaan program Kampung KB, tidak adanya pengambilan iuran bagi masyarakat Kampung KB menimbang kondisi ekonomi masyarakat di Kampung KB, satu satunya sumber anggaran adalah bersumber dari BKKBN kabupaten yang diberikan untuk membuat acara pencaangan Kampung KB. Tidak ada sumber dana lain lagi, sehingga menjadi suatu kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan di

Kampung KB

3. Komunikasi antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Bahwa komunikasi antarorganisasi belum berjalan baik, Hal ini bisa dilihat dari proses pertemuan evaluasi atau bisa disebut sarah sean sebagai wadah bagi para implementor atas dan bawah untuk saling bertemu dan mengkomunikasikan serta mengevaluasi perkembangan kegiatan dilapangan yang tidak dilaksanakan. Komunikasi antara pengurus kampung KB dengan kemitraan serta dinas dinas terkait yang belum terjalin dengan baik juga menjadi salah satu penghambat optimalnya implemenasi program ini, sehingga para implementor kampung KB dalam melaksanakan kegiatan hanya berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak pihak lainnya yang membuat salah satu tujuan dari program kampung KB yaitu meningkatkan peran pemerintah dan lintas sektor dalam mensukseskan program ini menjadi tidak terealisasikan.

4. Karakteristik Badan-badan

Pelaksana

Struktur birokrasi serta pembagian dan wewenang sudah telah dibuat mengikuti SOP atau petunjuk teknis pengelolaan kampung KB. Namun dalam pelaksanaannya pembagian kewenangan belum terlaksana dengan baik, didapati bahwa adanya implementor yang bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya masuk kedalam kepengurusan Kampung KB. Ditemukan beberapa implementor yang malah melempar tanggungjawabnya kepada implementor lain sehingga terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi. Tidak adanya peraturan ataupun norma yang mengatur para implementor dalam melaksanakan tugasnya serta kurangnya pengawasan yang mempengaruhi tidak optimalnya implementasi program kampung KB dilapangan

5. Kecendrungan Pelaksana

Bahwa sikap/kecendrungan para pelaksana sebagai implementor program Kampung KB di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah ini seluruhnya menerima

program Kampung Keluarga Berencana, tetapi dalam pelaksanaannya para implementor cenderung tidak berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga program Kampung KB menjadi tidak berjalan dan terbengkalai.

6. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik memberikan pengaruh pada proses pelaksanaan program Kampung KB di Desa Jungkat ini, Lingkungan ekonomi dan sosial yang menghambat dianggap sebagai tantangan bagi program ini agar bisa memberikan perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kampung KB itu sendiri. Respon masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung KB sangat baik serta mendukung program tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan komunikasi antarorganisasi dalam

pengelolaan kampung KB, penyediaan dana bagi pelaksanaan program kampung KB, merajut kerjasama terhadap dinas-dinas serta kemitraan yang ada disekitar wilayah kampung keluarga berencana, meningkatkan pengawasan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kampung KB yang harus dilaksanakan dengan teratur sehingga diharapkan bisa membuat implementasi program Keluarga berencana lebih baik lagi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2014 *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabetha
- , 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabetha
- , 2006. *Publik dan kebijakan publik*. Bandung, Alfabetha
- Bkkbn. 2018. *Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (Pedoman Bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan)*.
- Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian pendidikan dan Sosial*, Jakarta, Gaung Persada Press
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi Deddy, 2016 *Studi kebijakan publik dan pelayanan Publik*, Bandung Alfabetha
- Subarsono, AG. 2016. *Analisa Kebijakan Publik: konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 2005. *Analisa Kebijakan Publik: konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugioyono. 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- , 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tachjan, 2006 *Implementasi Kebijakan Publik* Bandung AIPI
- Winarno, Budi. 2016 *Kebijaka Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Caps Publishing
- , 2007 *Kebijakan Publik teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari formulasi, Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sumber Lain :

- Utari, Evi. 2017. “Implementasi program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Di desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas” Skripsi Universitas Tanjungpura